

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Keuangan yang baik akan mendapatkan dana dari masyarakat bagi pembiayaan pembangunan. Dengan demikian pemda dapat menyediakan *social overhead capital* yang memadai serta keberadaannya dapat menentukan suatu kesuksesan negara dalam penganekaragaman, perluasan perdagangan, mendukung perkembangan penduduk, pengentasan kemiskinan dan perbaikan kondisi lingkungan hidup bagi pemerintah daerah.

Menurut Mamesah (1995), dalam Halim (2004), keuangan daerah juga dapat diartikan sebagai: “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu yang berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah selagi belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi ataupun pihak lain yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari pengertian tersebut ada dua hal yang harus dijelaskan, yaitu:

- a. Yang dimaksud dari semua hak ialah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah,

hasil perusahaan milik daerah, dan hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hak disini akan meningkatkan suatu kekayaan daerah.

- b. Yang dimaksud dari semua kewajiban ialah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, infrastruktur, serta pengembangan ekonomi. Kewajiban disini akan menurunkan kekayaan daerah (Halim, 2004).

## 2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Faisal dalam Mesra (2017), Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus dipacu dan dipantau pertumbuhannya, dalam otonomi daerah kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat daerah. Maka dari itu pertumbuhan investasi di pemerintahan daerah sangat diprioritaskan dan diharapkan dapat memberikan akibat yang positif terhadap peningkatan perekonomian daerah.

Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah ialah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dapat dikelompokkan menjadi empat macam jenis pendapatan, yaitu:

- a. Hasil pajak daerah.

Menurut Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 Hasil Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangga sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya akan dipakai untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dipaksakan.

b. Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah ialah suatu pungutan yang telah sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa ataupun karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang berangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat pelaksanaannya yang bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, itu merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol ,dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat (Lestari, 2016).

Menurut Mesra (2017), Retribusi daerah terdiri dari tiga golongan, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh masyarakat.
  - 2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.
  - 3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada masyarakat yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan-kepentingan umum serta untuk menjaga kelestarian lingkungan.
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor kedalam kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah ialah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah suatu pendapatan daerah, memberi jasa,

menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah (Lestari, 2016).

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut untuk melapangkan, menunjang, ataupun memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu (Lestari, 2016).

Kewenangan otonomi daerah ialah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, seperti perencanaan, perizinan, serta pelaksanaan, kecuali kewenangan di bidang pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri, moneter atau fiskal dan agama serta kewenangan yang diatur oleh perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan otonomi ditingkat provinsi meliputi kewenangan-kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh daerah otonom kabupaten atau kota (Safitri, 2009 dalam Mesra, 2017).

Landiyanto (2005) dalam Mesra (2017), ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi ialah

1. Mampu mengelola keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, dikarenakan pendapatan asli daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Menurut Halim (2004), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi sebagai berikut:

- a. Hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan,
  - b. Penerimaan bunga deposito,
  - c. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
  - d. Penerimaan jasa giro,
  - e. Penerimaan ganti rugi atas kehilangan kekayaan daerah.
3. Potensi Keuangan daerah

Menurut Murib, P, Rotinsulu, C & Tolosang, D, (2016), potensi keuangan daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah sendiri (Provinsi/Kabupaten) dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan. Beberapa faktor-faktor yang

dapat dikendalikan contohnya faktor-faktor kebijakan dan kelembangaan, dan yang tidak dapat dikendalikan contohnya variabel-variabel ekonomi yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah, kondisi pertamakali suatu daerah dimana keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah itu dapat menentukan besar kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan pungutan. Hal ini disebabkan karena adanya struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat untuk menentukan tinggi atau rendahnya tuntutan dengan adanya pelayanan publik dalam kualitas dan kuantitas tertentu.

#### 4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan nasional ini merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Pendapatan nasional adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada dasarnya ini merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, ataupun jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Semakin tingginya pendapatan masyarakat maka semakin tinggi pula kewajiban masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Hasanah & Sunyoto, 2013).

Dalam perhitungan PDRB lapangan usaha terdiri dari sembilan sektor, yaitu :

- a. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
  - b. Sektor pertambangan dan penggalian
  - c. Sektor industri pengolahan
  - d. Bangunan (konstruksi)
  - e. Listrik, gas dan air minum
  - f. Angkutan dan komunikasi
  - g. Perdagangan, hotel dan restoran
  - h. Keuangan, persewaan, real estate dan jasa perusahaan
  - i. Jasa-jasa
5. Hubungan PDRB dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

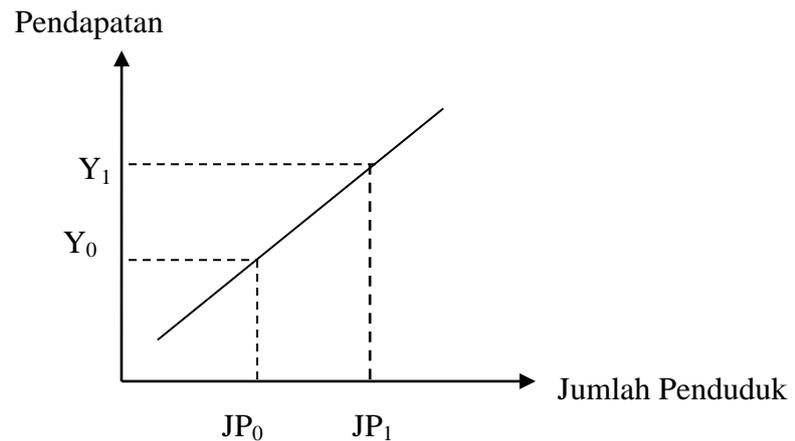
Menurut Atmaja, 2007 (dalam Masbar, R dkk, 2015), keterkaitan antara PBRD dengan PAD itu sebagai acuan pendapatan masyarakat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar pendapatan seseorang maka semakin besar pula seseorang itu membayar pungutan yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Pada tingkat distrusti pendapatan tertentu yang tetap, semakin besar PDRB perkapita ril suatu daerah maka semakin besar kemampuan masyarakat daerah untuk membayar pengeluaran pembangunan pemerintah dan pengeluaran rutin.

#### 6. Hubungan Jumlah penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Atmaja, 2007 (dalam Masbar, R Mayza, M dan Nasir, M 2015), keterkaitan antara Jumlah Penduduk dengan PAD ialah seberapa besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk disuatu daerah itu meningkat maka pendapatan tersebut akan meningkat pula, akan tetapi pertumbuhan penduduk tidak mempengaruhi pendapatan secara proporsional. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menaikkan output melalui penambahan ekspansi pasar yang baik dalam negeri maupun luar negeri. Pertumbuhan penduduk diiringi dengan majunya teknologi itu akan mendorong tabungan dan pengaruh terhadap skala ekonomi produksi.

Sumber daya manusia yang dilengkapi dengan keterampilan dan sikap mental disiplin terhadap pekerjaan, serta kemampuan untuk berusaha sendiri itu merupakan modal bagi terciptanya pembangunan. Terjadinya kenaikan atau penurunan dari jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor perekonomian akan mempengaruhi pendapatan asli daerah, karena tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas dan pelaksana dari pembangunan di daerah tersebut sehingga dapat memajukan daerah (Fitria Hening, 2016 dalam Jolianis, 2012).

Tingginya pendapatan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk jika jumlah penduduk suatu daerah meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat.



Sumber: Sadono Sukirno, 2004

**Gambar 2.1**

#### Kurva Hubungan Antara Jumlah Penduduk dan Pendapatan

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang diterima, oleh karena itu dapat meningkatkan permintaan konsumsi masyarakat, dan diikuti oleh peningkatan produksi sehingga dapat mengakibatkan adanya perluasan dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian sektor usaha baru dapat meningkatkan tenaga kerja baru atau membuka peluang untuk terbukanya lapangan pekerjaan bagi penduduk. Penduduk yang bertambah ini harus mempunyai daya beli sebelum permintaan berubah. Jika jumlah

tenaga kerja bertambah maka pendapatan akan meningkat dan akan meningkatkan pendapatan daerah. Jumlah penduduk dari  $JP_0$  menjadi  $JP_1$  menyebabkan pendapatan naik dari  $Y_0$  menjadi  $Y_1$  karena  $Y=C$  (Adi Haryanto, 2014).

#### 7. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang membutuhkan keterlibatan segenap unsur lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai pencetus dan sebagai fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, salah satunya anggaran belanja untuk terlaksanakannya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian akan digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain akan digunakan untuk kegiatan pembangunan diberbagai jenis infrastruktur. Pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi.

Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Yang dimana kelompok belanja tidak langsung ini merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan program (Mesra,2017).  
Belanja tidak langsung adalah:

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk tunjangan serta penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintahan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga ini digunakan untuk membayar pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi ini ialah biaya yang telah dianggarkan untuk memberikan biaya bantuan kepada perusahaan atau lembaga agar hasil produksi yang dijual oleh perusahaan atau lembaga tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat.

d. Biaya Hibah

Biaya yang telah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat yang telah ditentukan dan diberikan secara spesifik yang telah ditetapkan untuknya.

e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial ini digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dari pemerintah dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil ini digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditentukan.

g. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan ini digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum ataupun khusus dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa ataupun sesama pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

h. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga ini biaya yang telah dianggarkan untuk kegiatan yang tidak terduga dan tidak diharapkan seperti penanggulangan bencana alam, ataupun bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Kelompok belanja langsung ialah belanja yang telah dianggarkan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan atau program (Mesra, 2017).

Belanja langsung ialah:

1) Belanja Pegawai

Belanja untuk pengeluaran upah atau honorarium kepada pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Belanja Modal

Belanja modal ialah biaya pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan dan pembangunan aset yang mempunyai nilai manfaat dan dapat dipakai dalam jangka waktu lama untuk kegiatan pemerintahan seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

3) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa ini digunakan untuk pengeluaran pembelian barang yang nilai manfaatnya kurang dari jangka waktu 12 bulan dan pemakaian jasa dalam program dan kegiatan pemerintah daerah (Mesra, 2017).

## B. Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti                                      | Judul Penelitian  | Variabel  | Hasil Penelitian  |
|----|---|---|---|---|
| 1. | Perwira Ryan, Ridwan, Fattah Vitayanti, 2018. | Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan dan Jumlah Penduduk Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah. | Pengeluaran Pembangunan, Jumlah Penduduk Produktif, PDRB, Pendapatan Asli Daerah. | Produk domestik regional bruto, pengeluaran pembangunan dan jumlah penduduk produktif di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Secara parsial PDRB, jumlah penduduk produktif dan pengeluaran pembangunan berpengaruh signifikan. |
| 2. | Diana Lestari, 2016.                          | Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.  | PAD, PDRB Perkapita, Investasi Swasta, Inflasi, dan Kota Samarinda.               | Produk domestik regional bruto perkapita berpengaruh positif, investasi swasta dan inflasi memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap PAD   |

| No | Peneliti  | Judul Penelitian   | Variabel  | Hasil Penelitian   |
|----|---|--|---|--|
| 3. | Muhrib, Rotinsulu, dan Tolosang, 2016.              | Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan dan Jumlah Penduduk Terhadap PAD di Kabupaten Nabire Papua tahun 2004-2013. | Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan dan Jumlah Penduduk | Pendapatan perkapita, jumlah perusahaan, jumlah penduduk berpengaruh positif dan memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap PAD di kabupaten Nabire Papua tahun 2004-2013. |
| 4. | Masbar Raja, Mayza Miragustia, Nasir Muhammad, 2015 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh.   | Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi.                             | Jumlah Penduduk, PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan Inflasi tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap PAD.  |

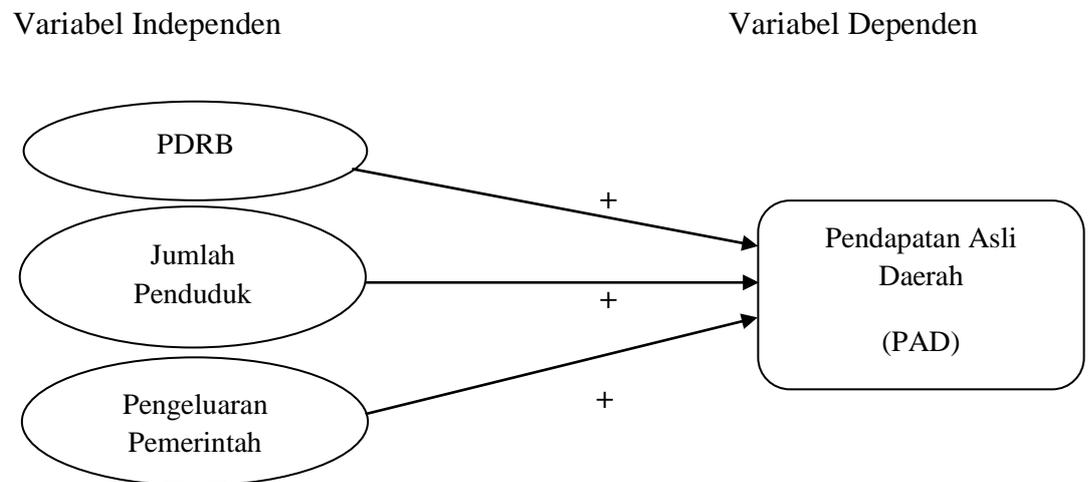
| No | Peneliti             | Judul Penelitian   | Variabel  | Hasil Penelitian   |
|----|----------------------|--|---|--|
| 5. | Fitria Hening, 2016. | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan Priode 2005-2014). | Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Jumlah Penduduk | Bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan, sedangkan variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. |
| 6. | Mesra, B, 2017.      | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara.  | Jumlah Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah.                        | Variabel jumlah penduduk, produk domestik regional bruto, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara.   |

| No | Peneliti                            | Judul Penelitian   | Variabel  | Hasil Penelitian  |
|----|-------------------------------------|--|---|---|
| 7. | Nur Syechalad, Sunsanti Hewi, 2017. | Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Aceh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Setelah Tsunami. | PAD, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah.                 | Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah di Aceh berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, secara keseluruhan membuktikan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. |
| 8. | Wang Fei, 2016.                     | <i>Analysis on the Regional Disparity in China</i>   | Income disparity, Regional Economy, Regional Policy, Theil Index. | Pengeluaran pemerintah, tingkat infrastruktur, urbanisasi dan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi regional dan peningkatan kesenjangan regional.                          |

| No  | Peneliti                         | Judul Penelitian  | Variabel   | Hasil Penelitian  |
|-----|----------------------------------|---|--|---|
| 9.  | Rao Durga & Sorsa Bereket, 2018. | <i>Analysis of the Contribution Tax to the Local Government Revenue Generation.</i> | Local Government, Revenue, Tax, Wolaita, Etihiopia.            | Variabel kontribusi pajak terhadap pendapatan pemerintah daerah di Ethiopia Selatan, Wolaita memiliki pengaruh yang positif . |
| 10. | Tosoni Alarco, 2014.             | <i>Wage Share and Economic Growth in Latin Amerika, 1950-2011</i>                   | Wages, Gross Domestic Product, Economic Models, Latin Amerika. | Hubungan antara pembagian upah dan produk domestik bruto di Amerika Latin memiliki hubungan yang berkorelasi positif.         |

### C. Model Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu maka peneliti dapat menyusun kerangka pemikiran yang menjadi sebuah dasar hubungan antar variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel independen adalah PDRB, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah yang dapat di gambarkan dalam gambar 2.2.



**Gambar 2.2 Kerangka Penelitian.**

Skema Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Variabel yang Mempengaruhinya

Dari kerangka pemikiran sebelumnya, penulis ingin megkaji apakah Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Bengkulu tahun 2013-2017.

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis ini merupakan jawaban yang sementara dari sebuah pelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu berdasarkan landasan teori dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka jawaban sementara ang menjadi hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Bengkulu tahun 2013-2017.
2. Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Bengkulu tahun 2013-2017.
3. Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Bengkulu tahun 2013-2017.